**Determinan Kemiskinan dari Faktor Sosial: Studi di Wilayah Pegunungan Kabupaten Garut**

Tasya Aspiranti1 dan Ima Amaliah2

1 Program Studi Managemen,2Program Studi Ilmu Ekonomi, Jl. Tamansari No. 1 BandungEmail: 1ad\_tasya@yahoo.com, 2 amalia.razi@gmail.com

Abstract

Poverty is a multidimensional problem because poverty is not only an economic problem but also a social and political issue. The purpose of this study is to identify poverty based on social factors in the mountainous region Garut regency. The research type is quantitative descriptive with field survey method. The sample of the research area is Talegong Sub-district which has 7 villages with the status of the backward village. The results show that social factors that cause high poverty in this region because of the contours of the region are very vulnerable to landslides with very difficult road access that is a small road, perforated with a very sharp turn. Along the road to the village found many landslide points. In addition, qualified human resources prefer to live in cities so that people in low-educated villages have an impact on the low quality of life and health as reflected in the development of chronic diseases in this region

**Key word:** Poverty, Social Factors and Mountainous Region

**ABSTRAK**

*Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional karena kemiskinan bukan hanya merupakan masalah ekonomi tetapi juga masalah social bahkan politik. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi kemiskinan berdasarkan faktor social di wilayah pegunungan Kabupaten Garut. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan metode survey lapangan. Sampel daerah penelitian adalah Kecamatan Talegong yang terdiri dari 7 desa dengan status desa tertinggal. Hasil dari identifikasi terpotret bahwa faktor social yang menyebabkan tingginya kemiskinan di wilayah ini karena kontur wilayah yang sangat rawan terhadap longsor dengan akses jalan yang sangat sulit yaitu jalan kecil, berlubang dengan kelokan yang sangat tajam. Di sepanjang jalan menuju desa ditemukan banyak titik longsor. Selain itu, SDM yang berkualitas lebih senang tinggal di kota sehingga masyarakat yang ada di desa tetap berpendidikan rendah yang berdampak pada rendah kualitas hidup dan kesehatan yang tercermin dari berkembangnya penyakit kronis di wilayah ini.*

***Kata Kunci****: Kemiskinan, Faktor Sosial, Wilayah Pegunungan*

**Pendahuluan**

Kemiskinan adalah suatu fenomena yang belakangan intens dibahas oleh berbagai pihak terkait, terutama pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sebagai penentu kebijakan. Menurut Badan Pusat Statistik, seseorang dianggap miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kebutuhan hidup minimal adalah kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan dalam takaran 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan minimal non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Sedangkan BPS menggunakan garis kemiskinan pemerintah sebesar Rp. 220.000 per kapita per bulan (Hermawan, 2012; 139). Khususnya di Jawa Barat, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih terkatagori tinggi. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Barat sampai bulan September 2014 adalah sebanyak 4.238.960 orang atau 9,18 % dari jumlah penduduk Jawa Barat. Proporsi ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Jawa Barat cukup tinggi. Fenomena lainnya memperlihatkan bahwa di daerah perdesaan jumlah penduduk miskin mencapai 10,88 % sedangkan di daerah perkotaan sebesar 8,32 %. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan di Jawa Barat. Dari tahun 2007-2010 angka kemiskinan di perdesaan secara berurutan tercatat 2,8 juta orang, 2,71 orang, 2,45 juta orang dan 2,42 juta orang. Jumlah tersebut lebih dari separuh jumlah penduduk miskin (Sundaya dan Muhardi, 2011; 57).

Dari hasil penelitian Aspiranti, Ima Amaliah, Pupung Purnamasari dan Sri Suwarsi (2016) menemukan Kabupaten Garut merupakan wilayah termiskin setelah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cirebon. Lebih lanjut jika dilihat dari pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan non makanan serta banyaknya protein yang dikonsumsi masyarakat nampak Kabupaten Garut memiliki tingkat pengeluaran yang paling kecil. Sementara jika dilihat dari luas lantai per kapita, Kabupaten Garut memiliki luas lantai paling sempit. Dari aspek kepemilikan sarana prasarana telekomunikasi Kabupaten Garut pun belum memiliki akses yang kurang memadai terhadap teknologi informasi (telpon rumah maupun komputer).

Meskipun selama 30 tahun terakhir, Kabupaten Garut melakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik melalui pendekatan sektoral, regional, kelembagaan, strategi maupun kebijakan khusus, seperti program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama Keluarga (Prokesos KUBE), Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Kukesra), Kredit Usaha Kecil Menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Jaring Pengaman Sosial (JPS), P2KP, PNPM Mandiri, dan sebagainya, namun, berbagai kebijakan program tersebut banyak mengalami hambatan dan kekurangan pada tataran implementasinya. Oleh karenanya, angka kemiskinan tetap tinggi di Kabupaten Garut.

Selama ini, potret kemiskinan lebih banyak terfokus pada aspek ekonomi saja, padahal kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensi yaitu menyangkut pula masalah sosial, politik, kelembagaan dan lain sebagainya. Dari hasil identifikasi di lapangan ternyata ada dua kecamatan yang memiliki wilayah tertinggal dan sangat tertinggal. Kedua kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Talegong dan Kecamatan Mekarmukti. Kecamatan Talegong merupakan salah satu kecamatan di wilayah pegunungan yang sangat rentan terhadap bencana alam serta sering terisolir dari hubungan dengan wilayah luar. Menjadi sangat menarik untuk diteliti, apakah betul Kecamatan Talegong terkatagori miskin karena faktor social? Jika benar, apa faktor yang cukup dominan yang membuat Kecamatan Talegong terkatagori wilayah sangat tertinggal?

**Faktor Sosial sebagai Sumber Penyebab Kemiskinan**

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru (2012:581), miskin artinya tidak berharta benda, serba kekurangan, papa, sangat melarat. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Lebih lanjut Bagong Suyanto (2013:4) telah membuat suatu klasifikasi kemiskinan yaitu untuk daerah perkotaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 420 kilogram per tahunnya, sedangkan daerah pedesaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras 320 kilogram per tahun. Miskin sekali apabila mengkonsumsi beras 240 kilogram per tahun dan paling miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 180 kilogram per tahunnya.

Ukuran kemiskinan juga diperkenalkan oleh UNDP yaitu pengukuran tingkat kemiskinan melalui indeks kemiskinan manusia (*Human Poverty Indeks*-HPI) kemiskinan diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama yaitu: Pertama, kehidupan lebih dari 30% penduduk negara kurang berkembang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun; Kedua, pendidikan dasar diukur oleh persentase penduduk dewasa yang buta huruf, serta Ketiga, keseluruhan ketetapan ekonomi (diukur oleh persentase penduduk tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih ditambah persentase anak-anak di bawah usia lima tahun yang kekurangan berat badan) (Todaro, 2006)

Masalah kemiskinan tidak akan pernah selesai hanya karena menggunakan cara pandang ekonomi. Proses pembangunan yang berlangsung selama ini telah melahirkan fenomena kemiskinan dengan ciri yang amat kental, misalnya keterbelakangan, keterpencilan, ketidakberdayaan dan ketersisihan. Ciri ini bahkan seringkali dianggap sebagai derivasi paling buruk dari fenomena kemiskinan. BPS membuat kriteria kemiskinan dari aspek sosial (Zulkifli, 2013) yaitu:

1. Kemiskinan, meliputi kelompok warga yang menyandang ketidakmampuan sosial ekonomi atau warga yang rentan menjadi miskin seperti: keluarga fakir miskin; keluarga rawan sosial ekonomi; dan warga masyarakat yang berdomisili di lingkungan kumuh;
2. Keterlantaran, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, seperti balita terlantar, anak dan remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, orang dewasa terlantar, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan lansia terlantar;
3. Kecacatan, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan fisik dan mental sehingga terganggu fungsi sosialnya, seperti: cacat veteran, cacat tubuh, cacat mental (retardasi, cacat mental psychotik), tuna netra, tuna rungu wicara dan cacat bekas penderita penyakit kronis.
4. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (*social adjusment*) secara normatif, seperti: tuna susila, anak konflik dengan hukum/ nakal, bekas narapidana, korban narkotika, gelandangan; pengemis, korban HIV/AIDS dan eks penyakit kronis terlantar.
5. Keterasingan/ keterpencilan dan atau berada dalam lingkungan yang buruk, meliputi warga masyarakat yang berdomisili di daerah yang sulit terjangkau, atau terpencar-pencar, atau berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat Terpencil.
6. Korban Bencana Alam dan Sosial, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, seperti: korban bencana alam, dan korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.
7. Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi, meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk, wanita korban tindak kekerasan, Lanjut Usia korban tindak kekerasan; dan pekerja migran korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif.

Kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan *material* (perspektif ekonomi), tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia (perspektif sosial) yaitu: Pertama, terbatasnya akses terhadap air bersih, terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air bersih; Kedua, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; Ketiga, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan terbatasnya akses sumber daya alam; Keempat, lemahnya jaminan rasa aman; Kelima, lemahnya partisipasi; Keenam, besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga (RTM) dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Rumah tangga miskin (RTM) mempunyai rata-rata anggota keluarga besar daripada rumah tangga tidak miskin.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005). Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya menyangkut kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan material tetapi juga kemampuan untuk akses sosial maupun politik.

Untuk mengidentifikasi faktor social penyebab kemiskinan di Kecamatan Talegong menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif deng metode survey langsung ke Desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Talegong. Responden yang diwawancarai adalah aparat desa di tujuh desa di Kecamatan Talegong. Untuk memotret dan mengamati fenomena yang ada, pengamatan di desa dilakukan selama dua minggu. Penetapan Desa Talegong sebagai wilayah survey merupakan hasil rekomendasi dalam penelitian sebelumnya.

**Profil Kecamatan Talegong**

Terdapat beberapa kecamatan di bagian Garut Selatan yang terkatagori tertinggal yaitu Kecamatan Talegong dan Kecamatan Mekarmukti. Secara umum karakteristik wilayah Kecamatan Talegong merupakan daerah pegunungan. Sementara Kecamatan Mekarmukti merupakan wilayah pesisir. Dalam tulisan ini hanya memfokuskan pada kajian Kecamatan Talegong sebagai wilayah pegunungan yang terkatagori tertinggal di Kabupaten Garut. Kecamatan Talegong memiliki luas wilayah sekitar 19.896,94 Ha dengan batas-batas wilayah di bagian utara yakni Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Bagian timur dibatasi oleh Desa Girimukti, Kecamatan Cisewu. Bagian selatan dibatasi oleh Desa Nyalindung, Kecamatan Cisewu. Adapun bagian Barat dibatasi oleh Kabupaten Cianjur. Secara umum karakteristik wilayah Kecamatan Talegong merupakan daerah pegunungan. Kondisi alam berbukit-bukit yang memiliki permukaan terendah dari laut setinggi 700 mdpl dan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang relatif cukup curam.

Kecamatan ini terdiri dari tujuh desa, yakni Desa Selaawi, Desa Sukamaju, Desa Sukamulya, Desa Mekarmulya, Desa Mekarmukti, Desa Sukalaksana dan Desa Mekarwangi. Dari tujuh desa tersebut ternyata Desa Sukamulya merupakan wilayah yang memiliki penduduk terbanyak yaitu 6234 orang dengan tingkat kepadatan 3,18 ha/ jiwa. Sedangkan desa dengan kepadatan penduduk paling rendah ialah Dasa Mekarwangi yakni 0,81 dengan jumlah penduduk 2.281 jiwa.

**Faktor Wilayah Penyebab Kemiskinan di Desa Talegong**

Kecamatan Talegong berada tidak jauh dari perbatasan Kota Bandung, tepatnya dari Cukul Pangalengan. Jarak tempuh dari Bandung menuju Kecamatan Talegong memakan waktu kurang lebih 5 jam. Akses jalan menuju kecamatan ini baik, akan tetapi memasuki jalan kecamatan jalannya mulai memperihatinkan. Jalan kecamatan ini telah di aspal, namun kondisinya sudah rusak dan terdapat banyak lubang. Hal ini diperburuk dengan kontur jalan banyak menurun dan belokan yang cukup tajam, sehingga untuk mengakses desa yang satu dengan desa lainnya cukup sulit dan memakan waktu lama.

Kecamatan Talegong memiliki letak geografis perbukitan. Sepanjang jalan terdiri dari tebing yang menjulang tinggi dan jurang curam di sisi lainnya. Dengan kondisi perbukitan ini pula tidak mengherankan jika Kecamatan Talegong merupakan daerah rawan longsor, sebab setiap kali hujan turun tanahnya yang gembur tidak kuat menahan beban saat diterpa air hujan hingga mengakibatkan longsor. Longsor bisa terjadi di beberapa titik saat hujan turun. Material longsor menutupi seluruh badan jalan yang lebarnya hanya bisa dilewati oleh satu mobil saja. Pemerintah kecamatan selalu sigap dalam menangani hal tersebut dengan mengirimkan bantuan berupa alat berat untuk membersihkan material longsor. Namun tidak jarang pula warga secara suka rela bergotong royong membantu membersihkan material longsor tersebut sebelum bantuan dari pemerintah datang.

Berdasarkan status desa, desa-desa di Kecamatan Talegong terkatagori desa sangat tertinggal dan tertingal. Desa yang terkatagori sangat tertinggal adalah Desa Selaawi, Desa Sukamaju dan Desa Sukamulya. Sedangkan desa yang terkatagori tertinggal yaitu Desa Mekarmulya, Desa Mekarmukti, Desa Sukalaksana dan Desa Mekarwangi berstatus desa tertinggal. Terdapat hambatan dalam hubungan fisik antar ketujuh desa, yakni kondisi wilayah yang berupa pegunungan, rawannya terjadi longsor dan minimnya akses jalan sehingga mengakibatkan tingginya penduduk miskin baik secara ekonomi maupun sosial di tujuh desa di Kecamatan Talegong.

**Faktor Sosial Penyebab Kemiskinan di Kecamatan Talegong**

Ada banyak indikator untuk melihat kemiskinan dari faktor social di Kecamatan Talegong. Dengan merujuk pada pemikiran definisi BPS dalam Zulkifli (2013) maka indikator yang akan digunakan untuk mengidentifikasi kemiskianan dari aspek social di wilayah pegunungan Kecamatan Talegong adalah banyaknya fakir miskin, buruh tani, rumah tidak layak huni, keluarga per tahapan sejahtera, kondisi kesehatan, jumlah penderita difabel, wilayah atau komunitas terpencil dan terisolir, tingkat pendidikan masyarakat dan akses terhadap air bersih.

Dari data Potensi Kecamatan Talegong, desa yang memiliki jumlah fakir miskin terbanyak adalah Desa Sukalaksana dengan jumlah KK sebanyak 598 atau 22 persen dari julah penduduk Kecamatan Talegong. Sedangkan desa yang jumlah keluarga fakir miskin paling rendah yaitu Desa Mekarwangi dengan total 145 KK. Banyaknya jumlah fakir miskin ini salah satunya d sebabkan karena tingkat pendapatan masyarakat yang rendah. Pendapatan perkapita masyarakat di Kecamatan Talegong Tahun 2016 berkisar antara Rp. 500.000- Rp. 600.000 per bulan (kurang dari $2 per hari).

**Tabel 1.** Jumlah Fakir Miskin, Jumlah Buruh Tani dan Rumah Tidak Layak Huni

 di Kecamatan Talegong Tahun 2016

| **Desa** | **Jumlah KK Miskin (orang)** | **Jumlah Buruh Tani (Jiwa)** | **Rumah Tidak Layak Huni (KK)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaawi | 441 | 981 | 52 |
| Sukamaju | 566 | 917 | 225 |
| Sukamulya | 541 | 1.046 | 196 |
| Mekarmulya | 288 | 826 | 100 |
| Mekarmukti | 208 | 2.153 | 20 |
| Sukalaksana | 598 | 850 | 804 |
| Mekarwangi | 145 | 212 | 60 |
| **Total** | **2.727** | 6.985 | 1.457 |

 Sumber: Dokumen Kecamatan Talegong, 2016

Sebagian besar penduduk Kecamatan Talegong sebagai buruh tani meskipun ada beberapa desa yang mayoritas penduduknya bertani sehingga dapat dilihat potensi unggulan desa ini adalah padi. Petani di Kecamatan Talegong masih bersifat tradisional,. Artinya penduduk belum mampu memanfaatkan lahan pertanian dengan optimal. Misalnya petani hanya menanam padi saja, belum mampu mengelola lahan secara optimal. Penyebabnya petani masih bersifat tradisional karena ketersediaan lahan yang sedikit, tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah sehingga belum mampu mengoptimalkan potensi lahan yang ada di setiap desa di Kecamatan Talegong.

Adapun jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Talegong paling banyak terdapat di Desa Sukalaksana dengan jumlah 804 KK atau sekitar 55.18 dari jumlah rumah tidak layak huni di Kematan Talegong. Tingginya angka tersebut disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah, sehingga kemampuan mengakses sarana dan prasarana dasar rendah karena daya beli yang rendah pula. Sedangkan jumlah rumah tidak layak huni paling rendah terdapat di Desa Mekarmukti dengan jumlah 20 KK. Karakteristik rumah di Kecamatan Talegong masih banyak yang panggung, terutama di desa-desa yang jauh dari kecamatan.

Dilihat dari tahapan kesejahteraan, masyarakat di kecamatan Talegong masih berada pada tahap prasejahtera yakni sekitar 44.16 persen. Hal itu berarti masih banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Desa di Kecamatan Talegong yang memiliki keluarga prasejahtera terbanyak adalah Desa Sukamaju dengan jumlah 830 KK atau sekitar 19.30 persen, sedangkang Desa yang memiliki tahap sejahtera 1 (satu) paling banyak adalah Desa Sukamulya yaitu 703 KK dan Desa yang memiliki kelompok keluarga katagori sejahtera 2 (dua) dan 3 (tiga) terbesar adalah Desa Sukamulya sebanyak 404 KK.

Kecamatan talegong terbebas dari pengguna narkoba serta penderita HIV. Namun di Kecamata ini ada 243 orang warga yang terserang penyakit kronis berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Kecamatan Talegong serta satu orang warga yang mengidap penyakit keganasan. Penyakit kronis ini terdiri dari penyakit jantung, hipertensi dan asma. Tingginya penderita penyakit kronis ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat akan asupan gizi yang aman bagi tubuh. Bagi masyarakat Kecamatan Talegong memakan makanan yang dihangatkan berulang-ulang, menggunakan minyak jelantah yang telah hitam, makan makanan tinggi garam, gula dan kalori merupakan hal biasa. Dengan demikian, sangat wajar jika angka kesakitan penyakit kronis sangat tinggi di Kecamatan Talegong.

Tingkat kecatatan fisik (*difabel*) maupun cacat mental di Kecamatan Talegong masih tergolong tinggi. Cacat fisik yang paling banyak diderita penduduk adalah tuna rungu, diikuti oleh tuna netra, tuna wicara dan tuna daksa. Adapun cacat mental paling banyak diderita masyarakat adalah idiot dan stress.Tingginya angka difabel di kecamatan ini dikarenakan rendahnya pendidikan masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki informasi yang banyak dalam pemenuhan gizi yang baik serta asupan vitamin dan mineral yang memadai pada saat hamil serta sulitnya akses kesehatan yang disebabkan keterpencilan wilayah kecamatan Talegong. Ketersediaan layanan kesehatan merupakan salah satu cara untuk memutus tingkat kemiskinan di desa, karena jika masyarakatnya sehat maka masyarakat akan bekerja lebih produktif yang berefek pada naiknya pendapatan dan kemampuan belanja masyarakat. Hasil akhirnya kemiskinan di desa dapat ditekan lebih rendah.

**Tabel 2.** Jumlah Difabel di Kecamatan Talegong Tahun 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Desa** | **Cacat Fisik** | **Cacat Mental** |
| **Tuna Netra** | **Tuna Wicara** | **Tuna Rungu** | **Tuna Aksara** | **Tuna Daksa** | **Lumpuh** | **Sumbing** | **Idiot** | **Stress** |
| Selaawi | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sukamaju | 13 | 10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sukamulya | 4 | 6 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Mekarmulya | 1 | 3 | 43 | 81 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mekarmukti | 3 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Sukalaksana | 17 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Mekarwangi | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| **Total** | **45** | **31** | **72** | **81** | **31** | **6** | **8** | **14** | **13** |

Sumber: Dokumen Perdesa di Kecamatan Taegong, 2016

Jarak antar desa dapat menjadi penyebab kemiskinan secara social di Kecamatan Talegong karena jarak antar satu desa dengan desa lainnya sulit dijangkau meskipun jaraknya tidak terlalu berjauhan. Jalan yang merupakan salah satu alat akses dalam kondisi rusak parah. Desa terdekat dari ibu kota kecamatan yaitu Desa Sukalaksana dapat ditempuh dalam waktu sekitar 30 menit dari kecamatan. Kondisi jalan menuju desa ini sebagian besar telah di aspal, namun keadaannya sudah rusak dan berlubang. Lebar jalannya hanya bias dilewati oleh satu mobil saja. Di sepanjang jalan banyak ditemui bekas material longsor, sekitar lebih dari 14 titik. Selanjutnya, jarak antara desa Sukalaksana dengan Desa Sukamaju dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Perjalanan menuju desa ini melewati jalanan yang kondisinya tidak baik dan berlubang, serta beberapa titik longsor. Untuk mencapai desa ini, dapat ditempuh melalui jalan provinsi yang kondisinya baik, namun setelah memasuki gerbang desa, kembali memasuki jalan yang kondisinya berlubang dan tidak baik dan tidak tidak ditemukan bekas longsoran. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagian besar akses jalan di Kecamatan Talegong dalam kondisi rusak dengan kontur jalan yang masih bersifat bebatuan dan pemadatan. Sulitnya akses jalan ini sebagai salah satu penyebab di kecamatan ini masih ada bebarapa wilayah atau lokasi yang terpencil. Di Desa Sukamulya terdapat beberapa kampung terpencil karena akses jalan yang masih jauh dari layak. Selain itu, letak kampung-kampung tersebut jauh dari perkampungan lainnya. Wilayah terisolasi lainnya terdapat di Desa Sukalaksana tepatnya di Dusun Cihanjuang. Sama halnya dengan wilayah terisolasi lain, dusun ini pun memiliki akses yang sulit dijangkau karena lokasi yang jauh dan akses jalan yang kondisinya masih pemadatan.

**Tabel 3.** Wilayah/Komunitas Terpencil di Kecamatan Talegong, Tahun 2016

|  |  |
| --- | --- |
| **Desa** | **Wilayah Terpencil** |
| Selaawi | - |
| Sukamaju | - |
| Sukamulya | Kp. Datarkupa 01/06Kp. Ciranca 04/07Kp. Cilipung Kompak 05/03Kp. Pasir Tando 05/07Kp. Pasir Hayam 04/06Kp. Pasir Hirung 02/05 |
| Mekarmulya | - |
| Mekarmukti | - |
| Sukalaksana | Dusun Cihanjuang |
| Mekarwangi | - |

 Sumber: Dokumen Kecamatan Talegong, 2016

Di Kecamatan Talegong akses terhadap air bersih sangat mudah, banyaknya sumber mata air, sumur dan muara sungai, sebab kecamatan ini terletak di wilayah perbukitan sehingga akses terhadap air sangat mudah. Dari tujuh desa yang ada di Kecamatan Talegong dapat dikatakan bahwa akses terhadap sumber air bersih dapat dikatan baik. Artinya masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan air baik untuk kebutuhan makan, minum, cuci serta untuk pertanian karena kondisi sumber mata air dalam katagori baik dan cukup baik. Meskipuan ada beberapa kasus seperti di Desa Salaawi sumber mata air sumur dalam keadaan rusak.

**Tabel 4.** Akses Air Bersih Kecamatan Talegong Tahun 2016

| **Desa** | **Jenis/ Sumber** | **Jumlah (Unit)** | **Pemanfaatan (KK)** | **Kondisi** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Selaawi | a. Mata Air b.Sumur Galianc. Sungai | 476551 | 650655Publik | RusakBaikSedang |
| Sukamaju | a.Sumur Galianb. Tangki Air Bersihc. Embungd. Mata Air | 36112343 | 36PublikPublik725 | BaikSedangSedangBaik |
| Sukamulya | a. Mata Airb. Sumur Galic. Sungai | 481785 | 120178240 | BaikSedangSedang |
| Mekarmulya | a. Mata Airb. Sumur Galic. Sungai | 40259 | 16543995 | SedangBaikRusak |
| Mekarmukti | a. Mata Airb. Sumur Galic.Sumur Serapan Air Rumah Tanggad. Sungai | 28516032117 | 1.7118757531.321 | BaikSedangBaikSedang |
| Sukalaksana | a. PAMb. Sumur Galic.Fasilitas Air Bersamad. Sungai | -5-- | 995170100 | Baik burukBurukBuruk |
| Mekarwangi | a. Mata airb. Sumur Galic. Sumur Pompad. Fasilitas Air Bersama | -453- | 36453698 | BaikBaikBaikSedang |

Sumber: Dokumen Perdesa di Kecamatan Talegong, 2016

Selain Desa Salaawi, desa lainnya yang memiliki akses terhadap sumber air kurang baik yaitu desa Sukalaksana dan Desa Mekarmulya.Kondisi perairan dan irigasi di Desa Sukalaksana sangatlah tidak bisa diandalkan. Saluran irigasi tidak terpelihara secara baik, padahal saluran irigasi ini sangat penting untuk mengelola tanah pertanian. Efeknya, sawah tidak berfungsi secara optimal karena tidak ada air yang memadani untuk bertanam padi. Selain itu, kondisi gunung yang ada di wilayah Kecamatan Talegong dalam kondisi gundul, sehingga tidak dapat menyimpan air dan berpotensi longsong jika musim hujan tiba.

Di Kecamatan Talegong ini terdapat banyak sekolah mulai dari sekolah dasar, SMP dan SMA yang berlokasi dekat kantor Kecamatan. Anak-anak dari berbagai desa bersekolah di sana, meskipun jarak yang ditempuh jauh dan tidak sedikit dari siswa-siswi yang berjalan kaki menuju sekolah. Setelah lulus sekolah, ada beberapa yang melanjutkan ke perguruan tinggi untuk mengejar gelar S1, bahkan terdapat diantara warga masyarakat Kecamatan Talegong yang melanjutkan hingga S2 dan S3. Warga Kecamatan Talegong yang memiliki pendidikan tinggi umumnya tidak kembali ke kampong halamannya. Mereka lebih senang berkarier di Kota yang memberinya penghasilan tinggi. Efeknya sumber daya manusia yang tertinggal di desa adalah merekan yang memiliki pendidikan rendah dan tidak dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan desanya. SDM yang ada adalah SDM yang tidak dapat bersaing di kota karena keterbatasan pengetahuan dan keahlian, sehingga agar dapat bertahan hidup mereka memilih tinggal di desa. Dengan demikian, SDM yang tersisa di Kecamatan Talegong adalah SDM yang berpendidikan rendah dan berfek pada sulitnya memutus rantai kemiskinan di Kecamatan ini. Padahal SDM yang berkualitas bergantung pada pendidikan dan keahlian dari sumber daya manusia itu sendiri. Jika sumber daya manusia dengan kualitas pendidikan dan keahlian yang tidak kompeten bekerja pada sector tertentu akan berdampak pada tingkat produktivitas dan peningkatan pendapatan (Jajang dkk. 2013; 202). Naiknya pendapatan akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membelanjai pengeluarannya, efeknya kemiskinan akan menurun.

**Tabel 5** SebaranJumlah Sekolah di Kecamatan Talegong Tahun 2016

| **Desa** | **SD** | **MI** | **SLTP** | **MTs** | **SMA** | **SMK** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selaawi | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
| Sukamaju | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Sukamulya | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Mekarmulya | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Mekarmukti | 3 | - | 1 | - | - | - |
| Sukalaksana | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
| Mekarwangi | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| **Total** | **23** | **7** | **5** | **3** | **1** | **2** |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kagut, 2016

**Simpulan dan Saran**

Dari hasil identifikasi data dapat disimpulkan faktor social penyebab kemiskinan di Kecamatan Talegong sebagai wilayah pegunungan lebih disebabkan karena kontur wilayah perbukitan yang sangat rawan terhadap longsong pada saat musim hujan. Selain itu, kondisi infrastruktur jalan yang sempit, berkelok dan berlubang membuat sulitnya akses ke wilayah ini. Sarana sekolah di Kecamatan Talegong cukup banyak, namun keinginan untuk sekolah masih sangat beragam serta masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi lebih senang bekerja di wilayah perkotaan. Efeknya kualitas sumber daya manusia di wilayah desa tetap rendah. Penyakit kronis seperti penyakit jantung, hipertensi dan asma cukup tinggi di wilayah ini karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pola hidup sehat. Jumlah penduduk difabel seperti cacat fisik yaitu tuna rungu, tuna netra, tuna wicara dan tuna daksa, cacat mental seperti idiot dan stress cukup tinggi di Kecamatan Talegong. Tingginya angka ini dikarenakan kurang asupan makanan bergizi, vitamin dan mineral pada saat seorang ibu hamil.

Dengan demikian, untuk menghilangkan ketertinggalan di Kecamatan Talegong, pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga aspek social seperti membuka akses jalan yang lebih baik, akses kesehatan, akses pendidika, akses terhadap air bersih dan membuka keterpencilan kampong karena kualitas jalan yang buruk.

**DAFTAR PUSTAKA**

 Aspiranti, Tasya, Ima Amaliah, Sri Suwarsi, Pupung Purnamasari. (2016).”*Pemetaan Wilayah Kemiskinan di Jawa Barat Berdasarkan Indikator Ekonomi*,”*Laporan Penelitian*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung

Badan Pusat Statistik. (2014),” *Konsep Kemiskinan*.” Jawa Barat: BPS

Badan Pusat Statistik. (2016). “Kecamatan Talegong dalam Angka”. Jawa Barat: BPS

Hermawan, Iwan. (2012).”Analisis Eksistensi Sektor Pertanian terhadap Pengurangan Kemiskinan di Perdesaan dan Perkotaan,”Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan. Vol. 28. No. 2 (Desember). 135-144. Bandung: LPPM Unisba

Jajang, Asep Saefuddin, I. Wayan Mangku, Hermanto Siregar. (2013).”Analisis Kemiskinan Menggunakan Model Panel Spesial Statik.” Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vo. 29 No. 2 (Desember). 195-203. Bandung: LPPM Unisba

Purwadinata, W.J.S.(1997),”*Kamus Umum Bahasa Indonesia*,” Jakarta: Balai Pustaka.

Sundaya, Yuhka dan Muhardi. (2011).”Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Petani Miskin Tanaman Pangan di Jawa Barat: Analisis dan Simulasi Kebijakan.” Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. XXVII.NO. 1 (Juni). 57-66. Bandung: LPPM Unisba

Suyanto, Bagong, 2013, Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanganannya, Penerbit Intrans Publishing, Malang.

Todaro M.P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Zulkifli, Arif. 2013. Kemiskinan di Indonesia atau *Poverty in* Indonesia. Diunggah dari <https://bangazul.com/potret-kemiskinan-di-indonesia/> pada tanggal 22 Agustus 2017